



Pentingnya Rencana dalam Sebuah Pemerintahan

Habibatul Qalbi^{1*}, Tarisha Lingke Lubis², Ghassani Marisah Hasibuan³
^{1,2,3}Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

Email : habibatul0206232086@uinsu.ac.id¹, tarisha0206232087@uinsu.ac.id²
ghassani0206232076@uinsu.ac.id³

Korespondensi penulis: habibatul0206232086@uinsu.ac.id*

Abstract. Plans are a vital component in a government to achieve directed and sustainable development. This research aims to identify the importance of plans in managing resources, setting priorities, and creating transparency and accountability in government. The method used in this research is qualitative analysis based on literature reviews and case studies related to plan implementation in various governments, both national and local. The focus of this research includes the role of plans in resource efficiency, risk mitigation, and coordination between institutions. The research results show that governments that have thorough planning are better able to optimize the use of budget, labor and time compared to governments without clear plans. In addition, a good plan helps the government anticipate potential risks and challenges, as well as provide strategic solutions to face them. In terms of transparency, planning documents enable the public to monitor government performance, increase public trust, and support public participation in the development process. This research also found that plans that are inclusive and involve various stakeholders are able to create stronger synergy between institutions and maintain program sustainability even if there is a change in leadership. In conclusion, plans in government are not only a tool to direct development, but also an important instrument to ensure stability, effectiveness and efficiency. With a structured plan, the government can achieve development goals optimally and have a significant impact on community welfare. This research recommends strengthening planning capacity at all levels of government to improve the quality of governance and public services.

Keywords: Planning, Achievement, Governance, Public Service

Abstrak. Rencana merupakan komponen vital dalam sebuah pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya rencana dalam mengelola sumber daya, menetapkan prioritas, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berdasarkan kajian literatur dan studi kasus terkait implementasi rencana di berbagai pemerintahan, baik nasional maupun lokal. Fokus penelitian ini meliputi peran rencana dalam efisiensi sumber daya, mitigasi risiko, serta koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan yang memiliki perencanaan matang lebih mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan waktu dibandingkan dengan pemerintahan tanpa rencana yang jelas. Selain itu, rencana yang baik membantu pemerintah mengantisipasi potensi risiko dan tantangan, sekaligus memberikan solusi strategis untuk menghadapinya. Dalam hal transparansi, dokumen perencanaan memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rencana yang inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat antar lembaga serta menjaga keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Kesimpulannya, rencana dalam pemerintahan bukan hanya alat untuk mengarahkan pembangunan, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan stabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Dengan rencana yang terstruktur, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas perencanaan di semua level pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Kata kunci: Perencanaan, Pencapaian, Pemerintahan, Pelayanan Publik

1. PENDAHULUAN

Merencanakan yakni sarana untuk mencapai tujuan, mengembangkan strategis agar tercapai tujuannya tersebut, serta memfasilitasi kembangkan yang direncanakan dalam operasi di suatu organisasi. Menurut Alder dan Rustiady (2008), “rencana yakni suatu proses yang tentukan keinginan untuk tercapainya dimasa mendatang serta tahapan nan dibutuhkan dalam mewujudkannya”. Perencanaan merupakan proses penting bagi semua fungsi manajemen karena tanpa pengorganisasian (perencanaan), fungsi pengendalian dan pemantauan tidak dapat dilakukan..

Merencanakan diartikan selaku proses untuk berikan capaian yang tujuannya ingin dicapai dan strategi untuk mencapainya. Hasil perencanaan adalah rencana, dokumen yang menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dan metode yang akan digunakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, membuat rencana atau melakukan fungsi perencanaan adalah tugas utama setiap manajer di setiap tingkat organisasi, sesuai dengan ruang lingkup otoritas dan pekerjaan mereka.

Perencanaan penting karena setiap kegiatan dan tindakan manajemen didasarkan pada dan/atau disesuaikan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga setiap rencana dan setiap rencana turunan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Manfaat perencanaannya:

- a. Berikan Arah
- b. Pengkoordinasian yang meningkat
- c. Ketakpastian dikurangi
- d. Pengontrolan yang meningkat
- e. Perbaiki dalam manajemen *time*

Dalam merencanakan sesuatu ada hubungan yang kuat terhadap perfunksian manajemen lainnya lebih utama dalam mengendalikannya. Hal tersebut di anggap selaku 2 hal oleh mata keuangan. Merencanakan dilaksanakan lewat tahapan, diantaranya:

- a) Tujuannya ditetapkan
- b) Menformulasikan perencanaan untuk distrategikan
- c) Mengembangkan perencanaan operational serta
- d) Pengevaluasian serta pengimplementasian perencanaan

Tiap yang gagal dalam rencananya tak disebabkan oleh rencana itu sendiri, ginanjar kartasasmita berpenapat bahwasanya hal tersebut bersumber dalam:

- 1) Perencanaan yang tidak memadai dapat disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap, kegagalan untuk menguasai metodologi, atau perencanaan yang tidak realistis yang tidak dapat dilaksanakan sejak awal.
- 2) Rencana ini mengikuti paradigma yang jelas tidak berhubungan dengan situasi dan perkembangan dan gagal mengatasi masalah mendasar negara-negara berkembang.
- 3) Rencana adalah desain keseluruhan kehidupan seseorang hingga detail terakhir.

System rencana tersebut, yang mempromosikan pengembangan mekanisme pasar dan partisipasi masyarakat dan telah berhasil diterapkan di negara-negara yang telah membuat langkah besar, seperti Jepang dan negara berkembang lainnya, didorong oleh masyarakat lokal dan perusahaan swasta dan menetapkan tujuan sosial dan ekonomi yang luas.

Dengan umumnya, “efektif” serta “efisien” bisa terjabarkan yakni: Efektivitas yakni upaya agar mencapai tujuannya, hasilnya, serta sasaran akan diinginkan bisa disesuaikan oleh waktunya dan sudah di tetapkan oleh individu atau perusahaan. Kerja dengan efektif sering dikaitkan oleh rencana, penjadwalan, serta pengeksekusian untuk membuat suatu putusan secara benar. Sebuah pekerjaannya dianggap efektif jikalau berhasil mencapai tujuannya sudah di tetapkan oleh sebelum kejadian, demikianlah, dalam hal ukuran hasil. Efisiensi, di sisi lain, adalah upaya yang menuntut penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan pada tingkat yang memuaskan tanpa membuang waktu. Oleh karena itu, efisiensi berjalan seiring dengan ketepatan waktu, yang mengharuskan bekerja secara optimal tanpa biaya dan pengeluaran yang berlebihan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakaikan metode yuridis normative yakni menyelidiki hukum dengan melakukan kajian berkualitas dalam kenormaan hukumnya. Telitian hokum notmative yakni berprosesan dalam menjumpai pengaturan prinsip serta teory hukuman agar terselesainya permasalahan berhukum. Didalam telitian hokum ini akan membahas mengenai “Pentingnya rencana dalam sebuah pemerintahan”.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai tujuannya di pemerintah, serangkaian kegiatan sistematis disiapkan agar tujuan tersebut tercapai secara tertib, efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang dioperasikan berdasarkan peran yang melekat dalam manajemen disebut fungsi. Fungsi manajemen yakni sekumpulan aktivitas telah dilaksanakan agar tercapai tujuannya secara sistematis. Pembagian kerja dan kelompok kerja dibentuk agar kegiatan dapat dilakukan secara tertib, efektif dan efisien. Pertimbangan klasifikasi sangat relatif dan tergantung pada sifat dan sifat organisasi, kemampuan sumber daya organisasi serta tujuannya bisa diinginkannya. Demikianlah, pakar manajemen mengklasifikasikan fungsi manajemen menurut aspek yang pembeda.

Dengan umumnya seluruh pakar akan bahas tentang perfunksian kepemimpinan dapat dipahami sebagai mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, mobilisasi dan pemantauan. Salah satu fungsi utama manajemen pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan negara adalah perencanaan. Rencana yang disiapkan atau dikembangkan dengan baik dan proses yang benar memfasilitasi atau mendukung pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, mobilisasi dan pemantauan, karena rencana tersebut dengan jelas menyatakan tujuan, sasaran, tahapan implementasi, penggunaan sumber daya manusia dan keuangan. Dilengkapi dengan indikator – dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat dievaluasi selama pelaksanaan kegiatan, terlepas dari apakah itu dilaksanakan secara terbaik maupun tak baik.

a. Pengertian serta Perkonsep Rencana

Rencana ataupun plan yakni sebuah perfunksian dalam manajemen hal sungguh terpenting. Dalam aktivitas tersebut sering dilengketkan atas aktivitas kehidupan keseharian manusia, mau secara sadar ataupun tak tersadari. Suatu perencanaan menjadi sungguh terpengaruhi suksesnya atau tak sukses dari sebuah kerjaan. Sebab kerjaan nan terbaik yakni perencanaan serta dilakukan sesuai oleh sudah di rencanakan.

➤ Perkonsep serta Makna

MT Todaro berpendapat bahwsanya rencana perekonomian yakni sebuah usaha keberimerintahan dengan disengaja agar dapat koordinasi mengambil putusan perekonomian oleh jangkapanjang beserta berpengaruh dalam atur serta kesejumlah pengontrol tingkatan laju pertumbuhannya diberbagai variable

perekonomian agar tercapai tujuannya didalam membangun nan sudah di tentukan sebelumnya.

Marck turner bersama david hulme berpendapat bahwsanya rencana pembangunan yakni prosesan memodernisasi keperubahan terseluruh oleh warga traditional ataupun pra moderen kebentuk kuasai tehnologi serta keperubahan keorganisasian social warga dalam tingkatan sejahteranya economi, menstabilitkan kepolitikan misal didunia barat.

➤ Undang-Undang No. 25 Ditahun 2004

Berdasarkan pernyataan sebelumnya maka bisa tersimpulkan bahwasanya rencana yakni rangkaian prosesan dalam menentukan penindakan dimasa mendatang dengan di sertai oleh timbangan secara terlogis serta kontinu agar dapat memanfaatkan sumber daya telah dimiliki agar tercapai tujuannya. Dalam rencana mempunyai 4 ketingkatan pengertian, diantaranya,

- 1) Tingkat kesatu (tak memiliki factor batasan) yang dimana rencana menetapkan tujuannya serta akan pilih tahapan nan diinginkan agar tercapai tujuannya.
- 2) Pada level kedua (dengan factor yang membatasi bagian dalam), rencana menetapkan tujuannya agar tercapai disetelah Anda perhatikan factor batasannya untuk tercapai tujuannya serta pilihan dalam memutuskan langkahnya.
- 3) Tingkat ketiga (memiliki factor batasan dari dalam dan diluar dengan mempengaruhi tercapai tujuannya). Pada tingkat ini, rencana menetapkan tujuannya akan bisa di capai disetelah kendala internal dan eksternal diidentifikasi dan tahapan akan tercapai tujuannya ini dipilih dan ditentukan.
- 4) Tingkat keempat (factor batasan internal ketiga Pengaruh untuk bagian diluar sangat besar dan tidak terkendali). Rencana tersebut memeriksa serta analisis situasi keadaannya, memprediksi pengembangan diberbagai factor nan tak terkendali dengan terdahulu, perkiraan factor batasan, dan tetapkan tujuannya yang tepat untuk dianggap bisa di capai, beserta sarana agar tercapai tujuannya.

b. Konsep serta Pengertian Kepemerintahan

Pemerintahan ditafsirkan dalam arti terluas dan tersempit dan dari beberapa sumber spesifik sebagai berikut: Artian meluas: Pemerintahan yakni tindakan pemerintah yang dilakukan oleh cabang legislatif, eksekutif dan yudisial suatu negara

untuk mencapai tujuan administrasi negara. Artian yang lebih sempit: Pemerintahan yakni kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh cabang eksekutif dan pejabatnya untuk mencapai tujuan administrasi kenegaraan.

Utreck berpendapat: Peristilahan dalam pemerintahan mempunyai definisi tak bersamaan. Berikut adalah definisinya:

- 1) Pemerintahan selaku persatuan oleh seluruh badan negara dengan memiliki kekuasaan untuk berikan perintah. Demikian, akan dimasukkan kedalam badan negara dengan memiliki tugas penyelenggara sejahtera umum, contohnya badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif.
- 2) Pemerintahan selaku segolongan dari badan negara paling tinggi dalam memiliki kuasa, akan berikan perintah disebuah kenegaraan contoh: kerajaan, kepresidenan, ataupun keagungan (Malaysia).
- 3) Pemerintah memiliki artian pada keneragaan (kepresidenan) bersama oleh cabinetnya.

Ilmu manajemen mulai dipelajari oleh orang-orang pada abad ke-19. Pada saat itu, seorang Prancis bernama Henri Fayolle (1841-1952), seorang insinyur yang bekerja di sebuah perusahaan pertambangan dan menjabat sebagai direktur pelaksana, sedang memikirkan langkah-langkah efektif untuk proses produksi perusahaan. Berdasarkan pengamatannya terhadap operasi perusahaan, ia menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar manajemen dapat diterapkan pada semua organisasi. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial, Henri Fayolle dianggap sebagai bapak teori manajemen modern karena ide-idenya, prestasi dan tulisannya yang besar, sedangkan F.W. Taylor selaku ayahanda penggerak manajemen keilmiahan.

Dalam melaksanakan sejumlah rangkaian tindakannya demikian bisa diartikan perfunksian dengan beda dan diberikan tugas pada tiap orang yang memiliki jabatan dengan tepat. Memanajemen penggerak disegenap keorganisasian dengan demikian rupanya lewat keharmonisan untuk tercapai tujuannya. Sebab, manajemen sebuah isyarat dalam memiliki jiwa pemimpin, dalam mengambil keputusan, berhubungan dengan masyarakat, serta masyarakatnya sendiri.

Kedinamikaan dalam pengetahuan manajemen luasnya di praktekkan pada perusahaan berswasta. Fenomena tersebut wajar saja disebabkan adanya perusahaan swasta yang memiliki upaya untuk tetap jalankan pola keorganisasian dengan terefektif serta efesiensi. Demikianlah, diakhir abad ke – 20, tiap teori serta praktis dimanajemen pemerintahan memulai untuk berkembang dalam manajemen pemerintah, ditahun 1887 wodow Wilson letakkan landasan tersebut untuk dikaji dalam keilmuan keadministrasian kenegaraan.

Namun untuk ilmu pemerintahan yakni kepengttahuan dengan otonom agar terselenggaranya study mengenai tahapan bagaimanakah kepenerintahan dinegara tersebut dapat tersusun serta berfungsi secara baik mau didalam ataupun diluar, yakni agar adanya hubungan atas masyarakat keneragaan. Hal tersebut ada didalam article political quarterly ditahun 1887 dengan judul the studi of administratioms, Wilson yang mengungkapkan bahwasanya semakin suka untuk berjalan disuatu konstitusi didalam menyusun. Sebab hak tersebut memerlukan tingkatan yang berfikir intelektualitas didalam menjalankan penugasan untuk memenajemen kenegaraan.

Adapun misi pemerintahan yakni melakukan yang terbaik, pengabdian untuk siapasaja dengan rata tak pandang keahlian clien agar ambil untung hingga berbirokrasi dipemerintahan untuk berikan etika baik. Contohnya melakukan bangunan pra sarana perhubungan dalam membuat jembatan, pemerintahan memiliki upaya supaya tiap masyarakat bisa memakai jembatannya.

4. KESIMPULAN

Perencanaan adalah elemen fundamental dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pentingnya rencana tersebut (1) Sebagai Kerangka Kerja dan Panduan, Rencana dalam pemerintahan berfungsi sebagai kerangka kerja yang sistematis agar tercapai tujuannya dalam waktu terpendek, menengah serta terpanjang. 2) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi, Dengan rencana yang jelas, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan memiliki dampak maksimal terhadap masyarakat. (3) Mendorong Partisipasi Publik, Rencana pemerintahan yang baik biasanya melibatkan proses partisipasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan merasa memiliki keterlibatan dalam pembangunan. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tulis dalam waktu sesingkatnya yakni bisa jawab tujuannya ataupun masalahnya dalam meneliti yang tunjukkan hasiln telitian

ataupun uji hipotesisnya, tanpa mengulang pembahasannya. Kesimpulannya akan di tulis dengan kritis, terlogis, serta berkejujuran lewat pernyataan dari hasilnya, beserta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Andhayani, A. (2020). Sistem informasi pemerintahan daerah: E-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>.
- Azzahra, N. F., dkk. (2024). Analisis yuridis perkara wanprestasi transaksi jual beli online pada putusan pengadilan nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel: Upaya hukum dan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 1(4), 133–143. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005>.
- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.
- Halawa, P. A., Ndraha, A. B., Lase, H., & Mendrofa, Y. (2023). Peran masyarakat dalam perencanaan sumber daya manusia di pemerintahan desa Dahana Tabaloho Kota Gunungsitoli. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 2119–2132. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.53454>.
- Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Kencana.
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 44–58. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>.
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya perencanaan dalam upaya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 21(2), 83–89. <https://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/26>.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.
- Tjandra, W. R. (2023). *Hukum sarana pemerintahan*. Kencana.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(1).